



## Pertarungan Ideologi Politik Dan Politik Identitas Dalam Kontestasi Elektoral Indonesia

Julia Safitri<sup>1</sup>, Jesika Merani Putri<sup>2</sup>, Lutfi Tri Aryani<sup>3</sup>

Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

\*Penulis Korespondensi: [safitrijulia773@gmail.com](mailto:safitrijulia773@gmail.com) , [jessikatubaba@gmail.com](mailto:jessikatubaba@gmail.com),  
[lutfitriaryani@gmail.com](mailto:lutfitriaryani@gmail.com)

**Abstract.** *Indonesia's electoral landscape has increasingly reflected a complex interplay between ideological contestation and identity-based politics. This study aims to analyze how political ideologies and identity narratives are mobilized during electoral competition, as well as their implications for democratic consolidation. Using a qualitative approach with literature review and case analysis of recent elections, this research examines patterns of political messaging, campaign strategies, and voter behavior. The findings indicate that while ideological discourse such as nationalism, religious values, and economic orientation—remains present, it is often overshadowed by identity politics rooted in ethnicity, religion, and social group affiliations. Political actors strategically employ identity markers to build emotional connections with voters, sometimes intensifying polarization within society. This dynamic not only shapes electoral outcomes but also affects the quality of democracy by shifting focus from policy-based debates to symbolic and identity-driven narratives. The study concludes that strengthening political literacy and institutional frameworks is essential to ensure that electoral competition remains substantive rather than divisive. The implications highlight the need for inclusive political communication and regulatory mechanisms to mitigate the risks of identity-based fragmentation in Indonesia's democratic process.*

**Keywords:** *democracy; electoral politics; identity politics; Indonesia; political ideology*

**Abstrak.** Kontestasi elektoral di Indonesia menunjukkan dinamika yang semakin kompleks, terutama dalam interaksi antara ideologi politik dan politik identitas. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana ideologi politik dan narasi identitas dimanfaatkan dalam proses persaingan elektoral, serta dampaknya terhadap kualitas demokrasi. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif melalui studi literatur dan analisis kasus pada beberapa pemilu di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun wacana ideologi seperti nasionalisme, nilai keagamaan, dan orientasi ekonomi masih muncul, praktik politik identitas yang berbasis agama, etnis, dan kelompok sosial justru lebih dominan dalam memengaruhi perilaku pemilih. Aktor politik cenderung menggunakan identitas sebagai alat mobilisasi dukungan karena dinilai lebih efektif dalam membangun kedekatan emosional dengan masyarakat. Namun, strategi ini berpotensi memperdalam polarisasi sosial dan menggeser fokus dari perdebatan substantif menuju isu-isu simbolik. Temuan ini mengindikasikan bahwa pertarungan politik tidak hanya terjadi pada level gagasan, tetapi juga pada konstruksi identitas kolektif yang sering kali dimanfaatkan secara pragmatis. Oleh karena itu, diperlukan penguatan literasi politik masyarakat serta peran institusi yang mampu menjaga kualitas demokrasi agar tetap sehat, inklusif, dan berorientasi pada kepentingan publik.

**Kata kunci:** demokrasi; ideologi politik; Indonesia; politik elektoral; politik identitas

### 1. LATAR BELAKANG

Dalam beberapa dekade terakhir, praktik demokrasi di Indonesia mengalami perkembangan yang cukup signifikan, terutama sejak era reformasi membuka ruang kompetisi politik yang lebih terbuka. Pemilu tidak lagi sekadar menjadi mekanisme pergantian kekuasaan, tetapi juga menjadi arena pertarungan gagasan, kepentingan, dan

strategi mobilisasi massa. Di tengah dinamika tersebut, muncul kecenderungan yang menarik untuk dicermati, yaitu menguatnya peran ideologi politik yang berkelindan dengan praktik politik identitas dalam proses kontestasi electoral (Iriyani Astuti Arief, Indra Lestari, 2023).

Ideologi politik berfungsi sebagai kerangka berpikir yang memandu arah kebijakan dan posisi politik suatu aktor atau kelompok. Dalam konteks Indonesia, ideologi seperti nasionalisme, religiusitas, hingga orientasi kesejahteraan sosial sering kali menjadi landasan dalam penyusunan visi dan program politik (Zalvadhia & Nuraeni, 2026). Namun, dalam praktiknya, penyampaian ideologi tersebut tidak selalu hadir secara utuh dalam ruang publik. Sebaliknya, ia kerap disederhanakan atau bahkan dikaburkan oleh narasi yang lebih mudah diterima secara emosional oleh pemilih, yaitu melalui identitas sosial seperti agama, etnis, dan golongan tertentu.

Sejumlah penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa politik identitas memiliki daya tarik yang kuat dalam masyarakat yang majemuk. Identitas menjadi alat yang efektif untuk membangun kedekatan psikologis antara kandidat dan pemilih. Dalam beberapa kasus pemilu di Indonesia, penggunaan simbol-simbol keagamaan, isu kesukuan, hingga dikotomi “kami” dan “mereka” terbukti mampu meningkatkan mobilisasi dukungan dalam waktu relatif singkat (Timur Tumanggor, 2025). Namun demikian, pendekatan ini juga menyimpan konsekuensi yang tidak sederhana, terutama terkait dengan meningkatnya polarisasi sosial dan menurunnya kualitas diskursus politik yang seharusnya berfokus pada program dan solusi kebijakan.

Terdapat pandangan yang menilai bahwa politik identitas tidak selalu bersifat negatif. Dalam batas tertentu, identitas dapat menjadi sarana representasi kelompok yang selama ini terpinggirkan dalam proses politik. Persoalannya muncul ketika identitas digunakan secara berlebihan dan cenderung eksploitatif, sehingga menggeser peran ideologi sebagai fondasi rasional dalam berpolitik. Pada titik ini, kontestasi elektoral tidak lagi didominasi oleh adu gagasan, melainkan oleh persaingan dalam membangun sentimen kolektif yang bersifat emosional.

Meskipun isu mengenai ideologi politik dan politik identitas telah banyak dibahas dalam berbagai penelitian, masih terdapat celah yang perlu diperhatikan lebih lanjut. Banyak studi cenderung melihat kedua aspek tersebut secara terpisah, padahal dalam

praktiknya keduanya sering saling beririsan dan membentuk pola interaksi yang kompleks. Selain itu, belum banyak kajian yang secara spesifik menelaah bagaimana aktor politik mengombinasikan ideologi dan identitas sebagai strategi dalam memenangkan kontestasi elektoral, serta bagaimana hal tersebut memengaruhi perilaku pemilih dan kualitas demokrasi secara keseluruhan (Fadhil et al., 2024).

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini memiliki urgensi untuk mengkaji secara lebih mendalam hubungan antara ideologi politik dan politik identitas dalam konteks pemilu di Indonesia. Fokus utama penelitian ini adalah memahami bagaimana kedua unsur tersebut digunakan dalam strategi politik, serta dampaknya terhadap dinamika demokrasi. Dengan demikian, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pola pertarungan ideologi dan politik identitas dalam kontestasi elektoral Indonesia, sekaligus menilai implikasinya terhadap kualitas proses demokrasi yang berlangsung.

## **2. KAJIAN TEORITIS**

### **A. Konseptualisasi Ideologi Politik dalam Kontestasi Elektoral**

Ideologi dalam ruang politik bukan sekadar kumpulan ide abstrak, melainkan alat mobilisasi massa yang krusial. Dalam konteks Indonesia, pertarungan ideologi sering kali berpusat pada spektrum nasionalisme-sekuler dan religiusitas. Herbert Feith menyebutnya sebagai persaingan antar "aliran" yang berakar kuat dalam struktur sosial masyarakat. Namun, dalam kontestasi elektoral modern, ideologi mengalami pergeseran fungsi (Nur Rahmad Teguh Septiyadi, 2025). Ia tidak lagi hanya menjadi kompas kebijakan, melainkan bertransformasi menjadi identitas kelompok yang digunakan untuk membedakan "kita" (ingroup) dan "mereka" (outgroup).

Fenomena ini selaras dengan teori *Social Identity* dari Tajfel dan Turner, yang menekankan bahwa individu cenderung mencari validitas melalui keanggotaan kelompok tertentu. Dalam pemilu, partai politik atau kandidat sering kali memperuncing perbedaan ideologis ini untuk menciptakan loyalitas pemilih yang emosional ketimbang rasional (Susanto et al., 2025).

### **B. Politik Identitas dan Polarisasi Masyarakat**

Politik identitas sering kali muncul sebagai strategi instan untuk meraih simpati konstituen dengan memanfaatkan sentimen SARA (Suku, Agama, Ras,

dan Antargolongan). Secara teoretis, politik identitas dapat dipahami sebagai upaya kelompok yang merasa terpinggirkan untuk menuntut pengakuan. Namun, dalam praktek demokrasi di Indonesia, hal ini sering kali bergeser menjadi "populisme identitas" (Frenki, 2021).

Krenke dan Smith berpendapat bahwa polarisasi terjadi ketika identitas sosial menjadi selaras dengan pilihan politik. Hal ini menyebabkan persaingan elektoral tidak lagi membahas program kerja secara substantif, melainkan terjebak pada sentimen primordial. Akibatnya, ruang publik menjadi terfragmentasi dan melahirkan apa yang disebut sebagai *echo chamber*, di mana pemilih hanya mau menerima informasi yang menguatkan prasangka mereka terhadap kelompok lawan (Susanto et al., 2025).

### **C. Tinjauan Literatur Terdahulu dan Landasan Pemikiran**

Beberapa penelitian sebelumnya memberikan dasar penting bagi analisis ini (Kamil, 2026):

1. Burhanuddin Muhtadi (2019) dalam studinya mengenai perilaku pemilih, menekankan bahwa variabel agama masih menjadi faktor penentu yang kuat dalam pemilu di Indonesia, meski isu ekonomi juga mulai membayangi.
2. Aspinal dan Mietzner (2019) mengkaji bagaimana polarisasi digital mempercepat penyebaran politik identitas melalui media sosial, yang membuat gesekan di tingkat akar rumput menjadi lebih intens dibandingkan periode sebelumnya.
3. Penelitian Marcus Mietzner (2018) menyoroti bangkitnya populisme Islam sebagai respons terhadap ketimpangan sosial, yang kemudian dikapitalisasi menjadi kekuatan electoral (Harun Ni'am, Ismiyatun, 2025).

Berdasarkan ulasan tersebut, penelitian ini berangkat dari pemikiran bahwa pertarungan ideologi di Indonesia saat ini telah mengalami penyempitan makna. Ideologi tidak lagi dipandang sebagai visi besar pembangunan bangsa, melainkan telah tereduksi menjadi sekadar instrumen politik identitas. Hal ini mengindikasikan adanya kecenderungan bahwa semakin kuat sentimen identitas yang dimainkan, maka semakin lebar pula celah polarisasi yang dihasilkan dalam Masyarakat (Nurdin, 2023). Dengan demikian, kualitas demokrasi kita sedang

diuji oleh sejauh mana pemilih mampu melampaui sekat-sekat identitas tersebut untuk melihat integritas dan kapasitas kandidat secara objektif.

### **3. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif-analitis. Pilihan metode ini didasarkan pada tujuan penelitian yang ingin memahami secara mendalam bagaimana ideologi politik dan politik identitas berinteraksi dalam kontestasi elektoral di Indonesia. Pendekatan kualitatif dinilai lebih mampu menangkap dinamika makna, strategi, serta konteks sosial-politik yang tidak selalu dapat diukur secara kuantitatif (Heryana, 2020).

Objek penelitian difokuskan pada fenomena kontestasi elektoral di Indonesia, khususnya pada beberapa momentum pemilu yang menunjukkan kecenderungan kuatnya penggunaan narasi ideologi dan identitas. Dalam hal ini, “populasi” penelitian merujuk pada berbagai peristiwa politik elektoral, sementara “sampel” diambil secara purposif, yaitu kasus-kasus yang dianggap representatif dan relevan dengan fokus penelitian. Pemilihan sampel dilakukan dengan mempertimbangkan intensitas penggunaan isu identitas serta kejelasan artikulasi ideologi dalam proses kampanye (Marinu Waruwu, 2023).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dan analisis dokumen. Data diperoleh dari berbagai sumber seperti jurnal ilmiah, buku referensi, laporan penelitian, serta dokumen publik yang berkaitan dengan pemilu dan praktik politik di Indonesia. Selain itu, data juga dilengkapi dengan penelusuran pemberitaan media yang kredibel untuk menangkap dinamika aktual di lapangan. Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri, yang berperan dalam menginterpretasikan data secara kritis dan sistematis.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis kualitatif melalui beberapa tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pada tahap reduksi, data yang telah dikumpulkan diseleksi dan difokuskan pada informasi yang relevan dengan topik penelitian. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk narasi yang terstruktur agar memudahkan pemahaman terhadap pola-pola yang muncul. Tahap akhir dilakukan dengan menarik kesimpulan berdasarkan temuan yang telah dianalisis, disertai

dengan interpretasi yang mengaitkan antara teori dan fenomena empiris (Abdul Fattah Nasution, 2019).

Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber, yaitu membandingkan informasi dari berbagai referensi yang berbeda. Hasil pengujian menunjukkan bahwa data yang digunakan memiliki konsistensi yang cukup tinggi dan dapat dipercaya sebagai dasar analisis. Dengan demikian, temuan yang dihasilkan diharapkan memiliki tingkat validitas yang memadai dalam menjelaskan fenomena yang dikaji (Dinata, 2025).

Model penelitian dalam studi ini bersifat konseptual, yaitu menggambarkan hubungan antara ideologi politik, politik identitas, dan kontestasi elektoral. Ideologi politik diposisikan sebagai variabel yang merepresentasikan kerangka nilai dan gagasan, sementara politik identitas dipahami sebagai strategi mobilisasi berbasis atribut sosial. Keduanya berinteraksi dalam arena kontestasi elektoral yang menjadi ruang kompetisi antar aktor politik. Dalam model ini, kontestasi elektoral tidak hanya dipengaruhi oleh kekuatan ideologis, tetapi juga oleh intensitas penggunaan identitas sebagai alat untuk memengaruhi perilaku pemilih.

#### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penelitian menggunakan pendekatan studi literatur yang diperkaya analisis kasus dari beberapa momentum pemilu di Indonesia, terutama Pemilu 2014, 2019, dan dinamika awal menuju Pemilu 2024. Meskipun tidak terikat pada satu lokasi geografis tertentu, data yang digunakan merepresentasikan dinamika nasional yang tercermin dalam berbagai wilayah melalui pemberitaan media, laporan penelitian, serta publikasi akademik (Wingarta et al., n.d.). Proses pengumpulan data dilakukan secara bertahap, dimulai dari identifikasi sumber relevan, seleksi data berdasarkan keterkaitan dengan fokus penelitian, hingga pengelompokan informasi sesuai dengan tema ideologi politik dan politik identitas.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam praktik kontestasi elektoral, terdapat kecenderungan kuat di mana ideologi politik mengalami penyederhanaan ketika masuk ke ruang kampanye. Ideologi yang seharusnya menjadi fondasi utama dalam membedakan kandidat justru sering kali dikemas dalam bentuk slogan umum yang sulit

dibedakan satu sama lain. Misalnya, hampir semua kandidat mengusung isu kesejahteraan, pembangunan, dan keadilan sosial, tetapi tanpa penjelasan mendalam mengenai arah kebijakan yang spesifik. Kondisi ini menyebabkan ideologi kehilangan daya tawarnya sebagai alat diferensiasi politik (Rubaidi, 2021).

Sebaliknya, politik identitas justru tampil lebih konkret dan mudah dikenali oleh pemilih. Dalam beberapa kasus yang dianalisis, isu agama menjadi faktor yang sangat dominan dalam membentuk preferensi pemilih. Selain itu, sentimen kedaerahan dan kedekatan etnis juga digunakan untuk membangun loyalitas politik. Strategi ini sering diperkuat melalui media sosial yang memungkinkan penyebaran pesan secara cepat dan masif, meskipun tidak selalu diiringi dengan verifikasi informasi yang memadai.

Untuk memberikan gambaran yang lebih sistematis, berikut disajikan tabel yang merangkum kecenderungan penggunaan ideologi politik dan politik identitas dalam kontestasi elektoral:

**Tabel 1. Perbandingan Karakteristik Ideologi Politik dan Politik Identitas dalam Pemilu**

<b>Indikator</b>	<b>Ideologi Politik</b>	<b>Politik Identitas</b>
Bentuk Penyampaian	Program kerja, visi-misi	Simbol, narasi emosional
Tingkat Kompleksitas	Tinggi (butuh pemahaman)	Rendah (mudah dipahami)
Daya Tarik Pemilih	Relatif terbatas	Sangat kuat
Media yang Digunakan	Debat, dokumen resmi	Media sosial, kampanye langsung
Dampak Sosial	Mendorong diskursus rasional	Berpotensi memicu polarisasi

Berdasarkan Tabel 1, terlihat bahwa politik identitas memiliki keunggulan dalam hal efektivitas mobilisasi massa, terutama karena sifatnya yang sederhana dan langsung menyentuh emosi pemilih. Namun, keunggulan ini juga menjadi sumber masalah ketika digunakan secara berlebihan, karena dapat memperkuat sekat-sekat sosial di masyarakat.

Jika dikaitkan dengan teori perilaku pemilih, temuan ini menunjukkan bahwa pendekatan psikologis dan sosiologis lebih dominan dibandingkan pendekatan rasional. Pemilih cenderung memilih berdasarkan kedekatan identitas daripada pertimbangan

program yang ditawarkan. Hal ini memperkuat argumen bahwa dalam konteks masyarakat yang plural, identitas menjadi variabel yang sangat menentukan dalam proses politik (Zalvadhia & Nuraeni, 2026).

Hasil penelitian ini juga memperlihatkan bahwa ideologi politik tidak sepenuhnya hilang, melainkan bertransformasi menjadi bagian dari narasi identitas itu sendiri. Sebagai contoh, nilai-nilai religius tidak hanya dipahami sebagai bagian dari keyakinan pribadi, tetapi juga dijadikan sebagai dasar legitimasi politik. Dengan kata lain, terjadi proses “pembungkusan ideologi” ke dalam identitas yang lebih konkret dan mudah diterima (Wingarta et al., n.d.).

Temuan ini sejalan dengan beberapa penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa lemahnya institusionalisasi partai politik di Indonesia menyebabkan ideologi tidak berkembang secara kuat. Namun, penelitian ini menambahkan bahwa kondisi tersebut bukan hanya disebabkan oleh faktor kelembagaan, tetapi juga oleh strategi pragmatis aktor politik yang lebih memilih pendekatan identitas karena dinilai lebih efektif secara electoral (Hidayati, 2023).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dominasi politik identitas dapat berdampak pada menurunnya kualitas demokrasi, terutama dalam hal rasionalitas pemilih dan kualitas debat publik. Demokrasi yang seharusnya menjadi ruang pertukaran gagasan justru berpotensi berubah menjadi arena konflik identitas. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat menghambat proses konsolidasi demokrasi karena memperkuat polarisasi sosial.

#### **A. Transformasi Ideologi Politik dalam Praktik Elektoral**

Ideologi politik seharusnya menjadi landasan utama dalam membedakan arah kebijakan antar kandidat. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam praktiknya, ideologi mengalami proses simplifikasi yang cukup signifikan. Kandidat cenderung menyampaikan ideologi dalam bentuk yang lebih umum agar mudah diterima oleh masyarakat luas. Misalnya, isu kesejahteraan, pembangunan, dan keadilan sosial hampir selalu muncul dalam setiap kampanye, tetapi sering kali tanpa penjabaran yang mendalam mengenai implementasinya (Hidayat et al., 2019).

Fenomena ini dapat dipahami sebagai bentuk adaptasi terhadap karakteristik pemilih yang heterogen. Dalam masyarakat yang beragam, penyampaian ideologi secara terlalu kompleks justru berpotensi mengurangi daya tarik politik. Oleh karena

itu, kandidat lebih memilih pendekatan yang bersifat inklusif dan tidak terlalu spesifik. Namun, konsekuensinya adalah ideologi kehilangan fungsi utamanya sebagai pembeda yang jelas antar pilihan politik (Muchdor, 2025). Selain itu, lemahnya institusionalisasi partai politik juga turut memengaruhi kondisi ini. Partai belum sepenuhnya mampu menginternalisasi ideologi kepada kader maupun pemilih, sehingga orientasi politik lebih banyak ditentukan oleh figur kandidat dibandingkan dengan platform partai.

#### **B. Dominasi Politik Identitas dalam Mobilisasi Elektoral**

Berbeda dengan ideologi yang cenderung abstrak, politik identitas justru memiliki karakter yang lebih konkret dan mudah dikenali. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa isu agama, etnis, dan kedekatan sosial menjadi faktor yang sangat efektif dalam menarik dukungan pemilih. Kandidat sering kali menggunakan simbol-simbol tertentu, seperti pakaian, bahasa, atau aktivitas keagamaan, untuk menunjukkan kedekatan dengan kelompok tertentu (Rubaidi, 2021).

Dominasi politik identitas tidak terjadi secara kebetulan, melainkan merupakan hasil dari perhitungan strategis. Dalam situasi kompetisi yang ketat, pendekatan berbasis identitas dianggap lebih cepat dalam membangun loyalitas pemilih dibandingkan dengan penyampaian program kerja yang membutuhkan pemahaman lebih mendalam. Hal ini diperkuat oleh kondisi masyarakat yang masih memiliki keterikatan kuat terhadap identitas sosialnya. Namun demikian, penggunaan politik identitas juga membawa risiko yang tidak kecil. Ketika identitas dijadikan alat utama dalam kampanye, maka ruang untuk diskusi yang lebih rasional menjadi semakin sempit. Politik tidak lagi berfokus pada solusi, tetapi lebih pada penguatan solidaritas kelompok (Susanto et al., 2025).

#### **C. Peran Media Sosial dalam Memperkuat Narasi Identitas**

Perkembangan teknologi informasi, khususnya media sosial, memberikan dampak besar terhadap dinamika politik elektoral. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa media sosial menjadi salah satu saluran utama dalam menyebarkan narasi identitas. Platform digital memungkinkan pesan politik disampaikan secara cepat, luas, dan berulang, sehingga lebih mudah memengaruhi persepsi public (Tsurayya & Annisa, 2023).

Media sosial juga memungkinkan terbentuknya “ruang gema” (echo chamber), di mana individu hanya terpapar pada informasi yang sejalan dengan pandangannya. Kondisi ini memperkuat keyakinan kelompok sekaligus meningkatkan potensi polarisasi. Narasi identitas yang disebarakan secara masif dapat membentuk persepsi yang sulit diubah, bahkan ketika dihadapkan pada informasi yang bertentangan. Media sosial juga memberikan ruang bagi munculnya disinformasi yang dapat memperkeruh situasi politik. Informasi yang bersifat provokatif sering kali lebih cepat menyebar dibandingkan dengan informasi yang bersifat factual (Mulia Ardi & Zahrina Nurfadillah, 2021). Hal ini menjadi tantangan tersendiri dalam menjaga kualitas demokrasi di era digital.

#### **D. Polarisasi Sosial sebagai Dampak Kontestasi Identitas**

Salah satu temuan penting dalam penelitian ini adalah meningkatnya polarisasi sosial sebagai dampak dari penggunaan politik identitas. Polarisasi tidak hanya terjadi pada level pilihan politik, tetapi juga merembet ke dalam kehidupan sosial sehari-hari. Masyarakat cenderung terbagi ke dalam kelompok-kelompok yang saling berseberangan, bahkan dalam interaksi di luar konteks politik. Polarisasi ini diperkuat oleh narasi yang membangun dikotomi antara “kita” dan “mereka”. Dalam jangka pendek, strategi ini memang efektif untuk mengkonsolidasikan dukungan. Namun dalam jangka panjang, hal ini dapat merusak kohesi sosial dan memperlemah solidaritas kebangsaan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pendekatan sosiologis dan psikologis dalam perilaku pemilih memiliki pengaruh yang sangat kuat. Identitas menjadi faktor utama dalam menentukan pilihan, sementara pertimbangan rasional cenderung berada di posisi kedua (Sukawan et al., 2021).

#### **E. Implikasi terhadap Kualitas Demokrasi di Indonesia**

Temuan penelitian ini memberikan gambaran bahwa dominasi politik identitas dalam kontestasi elektoral memiliki implikasi yang cukup serius terhadap kualitas demokrasi. Demokrasi yang ideal seharusnya menjadi ruang bagi pertukaran gagasan dan adu program, namun dalam praktiknya justru lebih didominasi oleh narasi identitas yang bersifat emosional. Kondisi ini menunjukkan adanya pergeseran dari demokrasi substantif menuju demokrasi prosedural. Pemilu tetap berjalan secara formal, tetapi kualitas diskursus politik mengalami penurunan. Hal ini dapat

berdampak pada kualitas kebijakan yang dihasilkan, karena proses pemilihan tidak sepenuhnya didasarkan pada pertimbangan rasional (Benu & Mbuik, 2024).

Penelitian ini menekankan pentingnya penguatan literasi politik dan pendidikan demokrasi bagi masyarakat. Pemilih perlu didorong untuk lebih kritis dalam menilai informasi dan tidak mudah terpengaruh oleh narasi yang bersifat provokatif. Selain itu, peran institusi seperti penyelenggara pemilu dan media juga menjadi sangat penting dalam menjaga agar proses demokrasi tetap berjalan secara sehat dan inklusif (Zalvadhia & Nuraeni, 2026). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertarungan antara ideologi politik dan politik identitas merupakan fenomena yang kompleks dan tidak dapat dipisahkan. Tantangan utama ke depan adalah bagaimana menjaga keseimbangan antara keduanya agar demokrasi di Indonesia tidak hanya berjalan secara prosedural, tetapi juga memiliki kualitas substantif yang kuat (Doing et al., 2025).

## **5. KESIMPULAN DAN SARAN**

Kontestasi elektoral di Indonesia menunjukkan adanya interaksi yang erat antara ideologi politik dan politik identitas, namun dengan kecenderungan dominasi pada aspek identitas. Ideologi politik memang tetap hadir sebagai kerangka normatif, tetapi dalam praktiknya sering disederhanakan sehingga kurang berfungsi sebagai pembeda yang jelas antar kandidat. Sebaliknya, politik identitas justru lebih efektif dalam menarik dukungan karena mampu membangun kedekatan emosional dengan pemilih. Kondisi ini menunjukkan bahwa perilaku pemilih tidak sepenuhnya didasarkan pada pertimbangan rasional, melainkan juga dipengaruhi oleh faktor psikologis dan sosial. Temuan ini sekaligus menegaskan bahwa pertarungan politik di Indonesia tidak hanya berlangsung pada level gagasan, tetapi juga pada konstruksi identitas yang digunakan secara strategis oleh aktor politik. Meskipun efektif dalam jangka pendek, dominasi politik identitas berpotensi menimbulkan polarisasi sosial dan menurunkan kualitas demokrasi jika tidak dikelola dengan baik.

Diperlukan upaya yang lebih serius untuk memperkuat literasi politik masyarakat agar pemilih tidak mudah terjebak dalam narasi yang bersifat simbolik semata. Selain itu, partai politik dan kandidat perlu didorong untuk lebih menekankan pada penyampaian program dan gagasan yang substantif, sehingga kontestasi politik tidak hanya menjadi

ajang mobilisasi identitas. Peran media juga penting dalam menyajikan informasi yang berimbang dan tidak memperkeruh situasi dengan narasi yang provokatif. Di sisi lain, penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi literatur tanpa dukungan data lapangan secara langsung, sehingga belum sepenuhnya menangkap dinamika empiris di tingkat akar rumput. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengombinasikan pendekatan kualitatif dan kuantitatif, serta melibatkan data primer seperti survei atau wawancara, agar dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai perilaku pemilih dan strategi politik dalam konteks yang lebih aktual.

#### **DAFTAR REFERENSI**

- Abdul Fattah Nasution. (2019). Buku Metode Penelitian Kualitatif. In *Sustainability (Switzerland)* (Vol. 11, Issue 1). [http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484\\_SISTEM\\_PEMBETUNGAN\\_TERPUSAT\\_STRATEGI\\_MELESTARI](http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI)
- Benu, A. Y., & Mbuik, H. B. (2024). Analisis Peran Ips Mewujudkan Profil Pelajar Pancasila Sebagai Gambaran Ideal Pembentukan Karakter Siswa Sekolah Dasar. *HINEF: Jurnal Rumpun Ilmu Pendidikan*, 3(1), 76–80. <https://doi.org/10.37792/hinef.v3i1.1175>
- Dinata, F. R. (2025). *Integrasi Metode Kualitatif dan Kuantitatif dalam Penelitian Manajemen Pendidikan Islam*. 1(2), 28–32.
- Doing, M., Wilopo, A., Ipur, F., & Lemen, A. (2025). *Model Hukum Demokrasi untuk Penyelesaian Sengketa Agraria oleh Lembaga Adat*. 1(2), 58–69.
- Fadhil, M., Aris, M., Saputra, I., & Syahril, M. (2024). Perbandingan Kebijakan Ekonomi Syariah di Negara Negara Islam. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 1(July), 183–193. <https://doi.org/10.5281/zenodo.12525882>
- Frenki. (2021). *Analisis Politisasi Identitas dalam Kontestasi Politik pada Pemilihan Umum di Indonesia*. 1(1).
- Harun Ni'am, Ismiyatun, P. S. (2025). *Politik Identitas Dalam Pemilihan Presiden Tahun 2024: Perspektif Komunikasi Politik*. 22(1), 128–149.
- Heryana, A. (2020). *Data dan Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif*.
- Hidayat, D., Eltariant, I., Priyatna, R. K., & Fernanda, S. A. (2019). Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Mencegah Degradasi Moral Terhadap Isu Sara dan Hoax. *Jurnal Rontal Keilmuan PKN*, 5(1), 49–56.
- Hidayati, N. (2023). Konsep Negara Dalam Pemikiran Politik Ali Abd AL-Raziq. *El-Dusturie*, 2(2), 165–184. <https://doi.org/10.21154/el-dusturie.v2i2.7631>

- Iriyani Astuti Arief , Indra Lestari, Y. S. (2023). *Kontestasi Wacana Politik Identitas Dalam Ruang Digital Menjelang Pemilihan Gubernur Sulawesi Tenggara*. 6(4), 1311–1324.
- Kamil, I. (2026). *Politik Identitas dalam Pemilihan Umum di Indonesia : Analisis Dampaknya terhadap Polarisasi Sosial*.
- Marinu Waruwu. (2023). Pedekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method). *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(2), 99–113. <https://doi.org/10.36706/jbti.v9i2.18333>
- Muchdor, A. (2025). *Kontemplasi Islam Kejawaen: Fundamentalisme Ideologi Hingga Sinergitas Perwujudan Nilai-Nilai Kasunyatan*.
- Mulia Ardi, & Zahrina Nurfadillah. (2021). Analisis Framing Berita Penembakan 6 Laskar FPI Pada Portal Berita Online CNN Indonesia Periode 19 Februari - 03 Maret 2021. *J-KIs: Jurnal Komunikasi Islam*, 2(1), 1–14. <https://doi.org/10.53429/j-kis.v2i1.189>
- Nur Rahmad Teguh Septiyadi, N. H. (2025). *Politik Identitas dan Krisis Kebhinekaan: Perspektif Moral Kebangsaan Buya Syafii Maarif*. 25, 159–171.
- Nurdin. (2023). *Kesejahteraan Sosial dalam Perspektif Demokrasi dan Otoritarian: Analisis Perbandingan Inggris dan Singapura*. 4, 140–167.
- Rubaidi. (2021). *Politik Identitas Islam Indonesia Kontemporer: Radikalisme Islam Versus Moderatisme Islam dalam Politik Elektoral Pilpres 2019 Contemporary*. 25(2), 149–167.
- Sukawan, A., Meilany, L., & Rahma, A. N. (2021). Literature Review: Peran CPPT dalam Meningkatkan Komunikasi Efektif Pada Pelaksanaan Kolaborasi Interprofesional di Rumah Sakit. *Indonesian of Health Information Management Journal (INOHIM)*, 9(1), 30–37. <https://doi.org/10.47007/inohim.v9i1.239>
- Susanto, S., Abra, E. H., & Hadiyanto, A. (2025). *Dinamika Politik Identitas Dalam Pemilu 2024: Tantangan Bagi Konsolidasi Demokrasi di Indonesia The Dynamics of Identity Politics in the 2024 Elections: Challenges for Democracy Consolidation in Indonesia*. 8(3), 1506–1518.
- Timur Tumanggor, A. A. A. (2025). *Politik Identitas dalam Ruang Demokrasi Indonesia: Dinamika, Strategi, dan Implikasinya Terhadap Kohesi Sosial*. 6(2), 1417–1426.
- Tsurayya, N. A., & Annisa, P. H. R. (2023). Fungsi Bahasa Dalam Jejaring Media Sosial Twitter. *Kajian Linguistik Dan Sastra*, 8(2), 142–160. <https://doi.org/10.23917/kl.v8i2.18463>
- Wingarta, I. P. S., Helmy, B., Hartono, D. W. I., & Mertadana, I. W. (n.d.). *Pengaruh Politik Identitas Terhadap Demokrasi Di Indonesia (The Influence Of Identity Politics On Indonesian Democracy)*. 9(4), 117–124.
- Zalvadhia, N. K., & Nuraeni, S. (2026). *Hegemoni Dan Identitas Politik: Analisis Demokrasi Radikal Laclau & Mouffe Pada Polarisasi Pemilu 2024*. 3, 1–9.